

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Hidup tanpa penindasan dari orang lain merupakan suatu keharusan bagi setiap umat manusia dan setiap bangsa. Keberadaan suatu bangsa yang agresif dan ingin menghilangkan keberadaan bangsa lain di tempat tersebut merupakan pelanggaran kemanusiaan yang serius. Adanya serangan dari negara-negara yang melakukan klaim sepihak tanpa mempertimbangkan solusi yang saling menguntungkan hanya akan menimbulkan perselisihan yang tidak ada habisnya. Keberadaan Israel yang hadir di tanah Palestina sebenarnya tidak ada kesalahan mutlak pihak Yahudi, karena Inggris sebelumnya telah memberikan janji.

Namun yang perlu diperhatikan adalah bagaimana Israel pada akhirnya bertindak sewenang-wenang terhadap warga Palestina pendahulunya dan masyarakat yang sudah menetap di wilayah tersebut. Perselisihan yang tiada habisnya karena kedua negara tidak menggunakan tolak ukur yang sama dan justifikasi masing-masing negara yang saling bertentangan membuat konflik ini tidak ada habisnya. Selain itu, hal ini semakin diperparah dengan ketidaktahuan negara-negara besar dunia dalam menyelesaikan masalah kemanusiaan ini.

Kedua faktor inilah yang menyebabkan semakin banyaknya korban manusia yang berjatuh dan ini merupakan catatan buruk dalam sejarah umat manusia. Indonesia dengan segala faktornya membantu Palestina sebagai korban konflik ini dapat mengerahkan kekuatannya untuk memastikan tidak ada lagi bangsa yang terjajah. Hal ini juga sejalan dengan landasan konstitusi, perjalanan sejarah politik, dan kesamaan identitas yang mereka miliki. Dengan upaya konsisten mendukung Palestina, penulis yakin konflik ini akan segera berakhir.

Kontribusi Indonesia selama ini dalam mendukung Palestina sejak awal kemerdekaan hingga hari ini sangat konsisten. Namun yang menjadi persoalan bagaimana peran diplomasi Indonesia harus lebih terlihat secara seimbang sehingga sikap netral yang diharapkan bagi Indonesia dapat terlihat jelas di samping perannya yang lebih aktif dengan memiliki hubungan baik dengan kedua pihak. Sebagaimana yang telah diharapkan oleh Gus Dur sebagai salah satu tokoh yang mendukung adanya hubungan baik dengan Palestina maupun Israel sebagai jembatan komunikasi dan mediator yang lebih baik. Hubungan baik dua pihak tentu akan menghantarkan Indonesia untuk lebih memahami kedua pihak secara mendalam dengan melakukan menggunakan diplomasinya sebagai alat komunikasi yang lebih efektif dan membangun sebuah “*Trust*” yang bukan hanya dari elit pemerintah negara tersebut, namun juga pihak-pihak dan elemen masyarakat kedua negara yang mungkin juga sampai hari ini masih menyuarakan hal yang sama dalam perdamaian dan masa depan Palestina dan Israel yang lebih baik.

Pembukaan dialog dengan Israel bukan berarti Indonesia mengakui segala sikap Israel yang telah dilakukannya terhadap Bangsa Palestina, melainkan membuka jalan dan bersama-sama memikirkan bagaimana persoalan yang sangat kompleks ini dapat diselesaikan melalui jalan diplomasi sebagai alat dialog untuk membangun sebuah jembatan yang lebih luas bagi keduanya. Hal ini serupa bagaimana peran Indonesia pada persoalan eskalasi yang terjadi di Afghanistan dan Taliban. Meskipun Indonesia tidak mengakui Taliban sebagai pemerintahan yang sah di Afghanistan dan cara-cara Taliban yang melanggar hukum internasional dan nilai demokrasi, namun Indonesia masih tetap menjalin komunikasi yang baik dan menjadi bagian dari mediasi dalam menyuarakan hak-hak fundamental masyarakat Afghanistan, khususnya wanita. Selain itu juga Indonesia telah berkomitmen untuk membangun dialog yang inklusif bukan pada level pemerintah, namun juga membangun dialog dan *Understanding* pada level pemimpin agama sehingga nilai-nilai agama bukan menjadi faktor penghambat demokrasi.

6.2 Saran

Sebagai upaya mendukung diplomasi Indonesia terhadap kontribusinya dalam penyelesaian konflik di Israel dan Palestina dan implementasi *Two-State Solution*, setidaknya terdapat beberapa Langkah yang menjadi pertimbangan Indonesia untuk lebih berperan aktif dan terbuka terhadap masalah Israel dan Palestina dan tercapainya perdamaian sebagai solusi akhir dari konflik ini. Dan menjadi Langkah-langkah Indonesia dalam membangun dialognya, khususnya dengan Israel. Langkah ini dibagi menjadi dua langkah, yaitu:

6.2.1 Langkah non-Politik

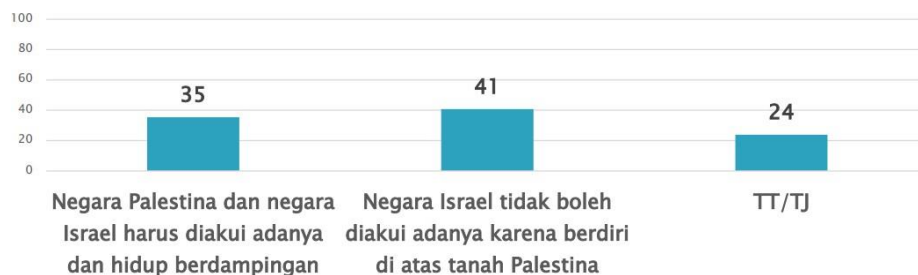
Dalam langkah non-politik, secara khusus ini berfokus terhadap bagaimana meningkatkan pemahaman secara luas dalam memandang konflik di Israel dan Palestina. Hal ini sangat berkontribusi terhadap bagaimana penyesuaian arah diplomasi Indonesia dalam mendukung kemerdekaan Palestina dan mendorong tercapainya perdamaian di Israel-Palestina melalui mengimplementasi *Two-State Solution* sebagai solusi perdamaian bagi Israel dan Palestina.

Secara umum, pemahaman masyarakat Indonesia terhadap isu Palestina masih dipahami secara sempit, yaitu dimana sebagian besar isu Palestina dan Israel merupakan isu yang sangat berkaitan dengan isu agama, dan secara spesifik mengasumsikan konflik ini adalah konflik antara Yahudi-Islam. Hal ini dapat dilihat dari bagaimana hasil survei yang dilakukan oleh Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) pada tahun 2021 mengenai pemahaman masyarakat Indonesia terhadap isu konflik Israel-Palestina secara umum khususnya. Dalam poling survei setidaknya sebanyak 65% menyatakan setuju bahwa konflik Israel-Palestina merupakan konflik antara Yahudi-Islam. Sedangkan 14% nya adalah tidak setuju bahwa konflik ini merupakan isu agama dan disusul dengan 22% yang tidak tahu bagaimana konflik Israel-Palestina ini.



(Tabel 6.2.1/1)

Sementara itu, hasil survei dalam mendukung eksistensi Palestina dan Israel yang berdampingan dengan damai dan bermartabat. Survei tersebut membuktikan bahwa sebanyak 41% masyarakat memilih untuk tidak mengakui eksistensi Israel dan berdiri berdampingan dengan Palestina. Sedangkan 35% nya adalah pihak yang mendukung eksistensi keduanya, atau secara tidak langsung mendukung pengimplementasian *Two-State Solution*. Kemudian disusul dengan 24% nya tidak tahu atau tidak memiliki jawaban apapun atau pasif dalam persoalan konflik Israel-Palestina.



(Tabel 6.2.1/2)

Oleh karena itu pentingnya edukasi terhadap penyampaian pemahaman terhadap konflik Israel-Palestina dari berbagai sudut pandang dari kaca mata bidang yang berbeda. Semua komponen dalam elemen masyarakat sangat penting dalam mendorong dan menciptakan citra masyarakat yang lebih baik dan meluas dalam persoalan konflik Israel-Palestina.

Misalnya dalam konteks edukasi, peran akademisi dalam memberikan informasi serta gagasan-gagasan yang justru mendorong terhadap dukungan perdamaian sangat penting, sehingga langkah diplomasi Indonesia juga semakin lebar dan lebih mudah dalam berkontribusi dalam mendorong kemerdekaan Palestina sebagaimana amanat yang tercantum dalam UUD 1945. Sebagaimana pandangan Gus Dur dalam melihat persoalan ini bahwa *“Bela Palestina itu adalah berdamai bersama Israel”* (Gus Dur, 2002).

6.2.2 Langkah Politik

a. Pembentukan Utusan Khusus Untuk Isu Israel-Palestina

Utusan khusus secara definisi memang dapat diterjemahkan sebagai utusan pemerintah sebuah negara atau organisasi untuk isu-isu tertentu. Dalam konteks Israel-Palestina, Indonesia belum memiliki utusan khusus yang dapat fokus terhadap pembentukan dialog dengan pihak-pihak yang ada di Palestina, baik dari kelompok Hamas, maupun dari kelompok Fatah sebagai representatif pemerintah resmi Palestina Saat ini.

Mengacu pada konsep yang ditekankan oleh Ginting (2013) bahwa bagian ini merupakan jalur awal terciptanya Konsultasi Publik yang artinya kedua belah pihak, dapat memberikan informasi terkait latar belakang pemicu konflik, memberikan pandangan yang terbuka sehingga dalam menyelesaikan permasalahan dapat ditemukan titik temu sehingga penyelesaian pada tahap selanjutnya dapat diselesaikan secara efisien dan adil serta membantu pihak ketiga yang mengawasi kemajuan penyelesaian konflik.

Selain itu juga pembentukan utusan khusus ini bertujuan agar komunikasi yang terjalin sebagai alat dibangunnya jembatan dengan dua pihak dapat terjalin, khususnya dengan Israel dengan membuka dialog dengan berbagai pihak, baik dari level pemerintah yang terbagi menjadi empat golongan, yakni kelompok kiri, sentral, kanan-sekuler, dan kanan ultra-

nasionalis. Sejalan dengan asumsi Kant mengenai *Democratic Peace Theory* bahwa kondisi dunia bisa bertransformasi menjadi tentram dan juga damai yang bersifat abadi apabila adanya kesadaran masyarakat internasional yang dalam hal ini adalah individu, konstitusi, hukum internasional yang mengatur aktivitas internasional serta negara untuk menyudahi sebuah perang (Dunne, 2005). Dalam hal ini Pancasila sebagai landasan nilai Demokrasi Indonesia dapat diterapkan dalam segala proses perundingan. Menjalin hubungan dengan organisasi non-pemerintah yang bergerak dalam upaya perdamaian di Israel dan Palestina. Hal ini untuk melihat berbagai perspektif yang ada dan membangun “*Trust*” atau saling kepercayaan terhadap Indonesia dalam berkontribusi dalam persoalan ini.

b. Pembukaan Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia

Langkah kedua setelah hubungan dengan berbagai pihak telah terjalin, Langkah selanjutnya adalah bagaimana Indonesia membuka perwakilan non-politik sebagai representatif resmi Indonesia. Tujuannya adalah selain menjalin hubungan bilateral, disisialin juga Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia atau KDEI ini juga dapat menjadi platform untuk meningkatkan komunikasi dua arahnya dengan Indonesia dan Israel, khususnya dalam membangun kepercayaan ing lebih inklusif antar pemerintah maupun masyarakat.

Pada asumsi yang ditekankan oleh Ginting (2013), empat upaya penyelesaian konflik yang salah satunya adalah implementasi. Pada tahap ini hubungan signifikan antara Indonesia dengan Israel telah memasuki pada tahap yang hampir seimbang seperti hubungan Indonesia dengan Palestina. Meskipun pada tahap ini secara implisit berfokus pada hubungan ekonomi masih berstatus perwakilan non-politik, justru pada tahap ini dialog yang diwakili oleh representatif pemerintah dapat dibuka. Karena pada tahap ini perwakilan tetap telah terbentuk. Maka dialog antar organisasi non-

pemerintah (NGOs) pun dapat terlaksana yang berfokus pada tahap pemberian informasi dan edukasi.

c. **Pembukaan secara penuh Hubungan Diplomatik**

Setelah ketiga Langkah diatas dapat berhasil dilakukan, dan telah membentuk “*Trust*” baik masyarakat secara umum maupun pemerintah sebagai bentuk tujuan dan visi apa yang dilakukannya, Indonesia dapat mempertimbangkan pembukaan hubungan diplomatiknya dengan Israel dan tentu dengan pertimbangan dan “*Trust*” yang telah Indonesia bentuk dengan Palestina bahwa Langkah ini menjadi bagian terpenting dalam upaya pencapaian *Two-State Solution* dan perdamaian yang lebih inklusif dengan kedua pihak.

Sejalan dengan asumsi Ginting (2013), empat upaya penyelesaian konflik dan mencapai solusi perdamaian jangka panjang harus mencakup konsultasi publik, negosiasi, mediasi, dan implementasi. Untuk bagian ini, setelah kedua langkah di atas termasuk Langkah Non-Politik berhasil dilaksanakan, langkah selanjutnya bagaimana proses negosiasi, mediasi dilakukan. Pada konteks ini, hubungan yang baik dengan pihak Hamas dan Fatah sebagai faksi terbesar di Palestina juga harus turut andil dalam proses ini. Hal ini agar tercapainya kesepakatan antara Israel dan Palestina untuk membangun “*Trust*” terhadap Indonesia sehingga dialog menuju meja perundingan dapat tercapai, dan norma-norma yang dihasilkan akan lebih menyuarkan kepentingan kedua pihak.

Sebagai penutup dan penegasan kembali argumentasi diatas, mencapai solusi perdamaian dalam konflik Israel-Palestina dengan menterjemahkan *Two-State Solution* sebagai solusi yang merepresentasikan dua elemen penting, yaitu *Two-State for Two-People* artinya dua negara untuk dua kelompok masyarakat. Indonesia sebagai aktor yang netral dalam terwujudnya upaya tersebut harus memastikan

bagaimana dua komponen diatas dapat dicapai. Hal ini sebagaimana yang ditegaskan oleh (Gershon Baskin, 2017) sebagai pembanding dalam bukunya “*In Pursuit Peace in Israel and Palestine*”, bahwasannya solusi *Two-State Solution* bukanlah solusi yang memisahkan kedua negara dan masyarakatnya yang mempertahankan tembok pembatas atau *Border Wall*, Pos Pemeriksaan atau *Security Checkpoint* yang bersifat eksklusif, melainkan solusi yang inklusif dimana interaksi antara pemerintah diikuti oleh interaksi dan hubungan yang baik antara masyarakat yang kemudian menumbuhkan rasa *Trust* diantara keduanya.

Peran Indonesia disini adalah bagaimana upaya penerapan *Two-State Solution* ini dapat diimplementasikan melalui perannya sebagai mediator yang menjembatani proses perundingan perdamaian. Dan faktor utama untuk melandasi hal tersebut adalah:

1. UUD 1945 yang mendorong ketertiban dunia, berkontribusi pada perdamaian, menghilangkan penjajahan, melahirkan semangat demokrasi
2. Mengimplementasikan nilai-nilai demokrasi (Pancasila) sebagai nilai identitas demokrasi Indonesia yang dibuktikan dengan semangat multikulturalisme dan musyawarah dalam menyelesaikan persoalan
3. Dan membangun kembali semangat *DOP (Declaration of Principles)* antara Israel-Palestina yang disepakati pada 13 September 1993 untuk kembali membangun *framework* mekanisme proses normalisasi, *mutual recognition, mutual confidence building* yang menghantarkan keduanya untuk kembali melakukan negosiasi dan duduk bersama di meja perundingan. (Gershon Baskin, 2017).